

PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DI KOTA LUBUK LINGGAU

Hadi Sanjaya

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau

Email: hadigems77@gmail.com

ABSTRACT

This study provides an in-depth analysis of the policy strategies for accelerating poverty reduction in Lubuk Linggau City through three main focuses: (1) the implementation of poverty alleviation policies and strategies; (2) the factors influencing policy implementation; and (3) stakeholder interactions in policy implementation. The study's novelty lies in the comprehensive application of all nine indicators of Merilee S. Grindle's (1980) policy implementation theory within the context of poverty governance in a medium-sized city in South Sumatra, a setting that has not previously been examined in such a specific manner, as well as in the development of the Integrated Poverty Governance Framework (IPGF) as a localized operational recommendation model. This study employed a descriptive qualitative approach using an in-depth single-case study. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with 12 key informants, and document analysis. The data were analyzed using the interactive model developed by Miles et al. (2014), supported by source and method triangulation. The findings indicate that policy implementation encountered critical challenges in six of Grindle's nine implementation indicators, including limited representation of the interests of poor communities, the predominance of social assistance over structural empowerment, change targets that were not supported by transformative strategies, fragmented decision-making authority, an inadequate ratio of MSME facilitators to assisted enterprises (1:4,605), and sectoral ego among regional government agencies (OPDs), which weakened inter-agency coordination. The study recommends reforming the Regional Poverty Reduction Coordination Team (TKPKD) based on an impact governance approach, developing an Integrated Poverty Information System (SIKT), establishing MSME Support Centers (Rumah UMKM), and institutionalizing multi-stakeholder partnerships.

Keywords: Policy Implementation; Poverty Reduction Acceleration; Stakeholder Coordination.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam strategi kebijakan percepatan penurunan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau melalui tiga fokus: (1) pelaksanaan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan; dan (3) interaksi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan komprehensif seluruh sembilan indikator teori implementasi Merilee S. Grindle (1980) dalam konteks tata kelola kemiskinan kota menengah di Sumatera Selatan yang belum pernah diteliti secara spesifik, serta pengembangan *Integrated Poverty Governance Framework* (IPGF) sebagai model rekomendasi operasional terlokalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al., (2014) dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan kritis pada enam dari sembilan indikator Grindle, keterwakilan kepentingan kelompok miskin yang terbatas, dominasi bantuan sosial atas pemberdayaan struktural, target perubahan yang tidak didukung strategi transformatif, dispersi kewenangan pengambilan keputusan, rasio pendamping UMKM yang tidak memadai (1:4.605), dan ego sektoral OPD yang melemahkan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi TKPKD berbasis impact governance, pembangunan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKT), pendirian Rumah UMKM, dan pelembagaan kemitraan multi-pihak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Koordinasi Stakeholder

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melampaui sekadar kekurangan pendapatan. Buni et al., (2025) mendefinisikannya sebagai deprivasi kapabilitas ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat akibat kekurangan kebebasan substantif yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Moser, (1995) memperkaya perspektif ini dengan memandang kemiskinan sebagai jaring kelemahan yang saling memperkuat kekurangan materi, isolasi, kelemahan fisik, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Dalam kerangka pembangunan global, *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai tujuan pertama yang wajib dicapai seluruh negara anggota PBB (Lee et al., 2016). (Bank, 2022) melaporkan bahwa meskipun kemiskinan ekstrem global menurun dramatis selama tiga dekade, pandemi COVID-19 mendorong kembali lebih dari 70 juta orang ke dalam kemiskinan pada 2020-2021 membuktikan bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga kebijakan pengentasannya harus memiliki dimensi ketahanan (*resilience*) sekaligus transformasi struktural.

Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan nasional telah menurun dari 24,2%

pada 1998 menjadi 9,03% pada 2024, jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,22 juta jiwa per Maret 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Yang lebih mengkhawatirkan, target RPJMN 2020–2024 yang menetapkan kemiskinan di kisaran 6,5-7,5% pada akhir periode tidak tercapai, sementara kemiskinan ekstrem masih berada di angka 0,83% jauh dari target penghapusan yang dicanangkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan persistensi kemiskinan struktural yang tidak dapat diatasi semata melalui pertumbuhan ekonomi agregat tanpa disertai kebijakan redistribusi dan pemberdayaan yang tepat sasaran. Todaro & Smith, (2015) menegaskan bahwa kombinasi modal manusia rendah, keterbatasan pasar kerja formal, dan ekosistem usaha mikro yang lemah membentuk *poverty trap* lingkaran kemiskinan yang hanya dapat ditembus melalui intervensi kebijakan yang simultan pada berbagai dimensi secara bersamaan.

Kota Lubuk Linggau sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan bagian barat tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang kompleks dan persisten. Data Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau, (2025) mencatat perkembangan angka kemiskinan: 12,71% (2020), 13,23% (2021), 12,68% (2022), 12,65% (2023), 11,14% (2024), dan 10,49% (2025), dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 ribu jiwa dan

garis kemiskinan sebesar Rp 632.783 per kapita per bulan pada tahun 2025. Rata-rata penurunan hanya 0,033 poin persentase per tahun jauh di bawah laju yang dibutuhkan untuk mencapai target RPJMD 2025-2029. Kondisi ini diperparah oleh dua faktor struktural yang saling berkaitan dengan rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,11 tahun pada 2024, di bawah rata-rata nasional 8,77 tahun serta tingkat pengangguran terbuka 5,24% yang masih di atas rata-rata nasional 4,82% (Badan Pusat Statistik, 2024). Kombinasi ketiga faktor ini membentuk apa yang digambarkan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Abidin et al., 2013).

Distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merata atau timpangnya tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan. Dimana kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Peningkatan ketimpangan pendapatan yang disebabkan atas menurunnya tingkat pendapatan tenaga kerja, secara tidak langsung menarik kelompok penduduk yang di awalnya memiliki pengeluaran rata-rata diatas garis kemiskinan menuju pada pengeluaran rata-rata dibawah garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Abdillah & Mursinto, (2016) dalam risetnya bahwa, kemiskinan

ditandai dengan pendapatan yang diperoleh seseorang dibawah ambang batas atau standar kemiskinan tertentu. Dimana seseorang dikategorikan miskin, jika rata-rata pendapatan per kapita per bulannya berada dibawah garis kemiskinan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Masalah pengangguran semakin bertambah serius yang disebabkan oleh perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar (Sukirno, 2015). Industri yang mengalami bangkrut sehingga memberhentikan tenaga kerjanya juga ikut berperan dalam peningkatan jumlah penduduk miskin ini. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah merespons permasalahan ini melalui berbagai regulasi dan program pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hingga RPJMD 2025 - 2029 dengan target penurunan angka kemiskinan ke bawah 8% dalam empat tahun. Namun sebagaimana

ditegaskan Pressman & Wildavsky, (1984) bahwa keberhasilan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas rumusan kebijakan itu sendiri, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya suatu proses yang sarat kompleksitas, ketidakpastian, dan potensi penyimpangan dari tujuan semula sehingga permasalahan fundamental yang mendorong penelitian ini.

Kajian tentang implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menghasilkan literatur yang cukup kaya. Putra et al., (2024) mengevaluasi PKH dan PNPM Mandiri dan menemukan bahwa keduanya berhasil menurunkan kemiskinan jangka pendek namun gagal menciptakan transformasi struktural yang berkelanjutan. Dalam dimensi koordinasi kelembagaan, Setyanto, (2025) mengidentifikasi tumpang tindih program dan inkonsistensi data lintas kementerian sebagai hambatan sistemik yang terus berulang, sementara Ekaputra et al., (2025) menemukan variasi kapasitas pemerintah daerah yang sangat besar pasca-desentralisasi. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Chairani et al., (2025) menegaskan peran strategis UMKM sebagai penyerap tenaga kerja, sementara Siswanto, (2024) menemukan bahwa program tanpa pendampingan berkelanjutan menghasilkan dampak yang tidak sustainable, dan Harahap et al., (2025) mengkonfirmasi korelasi signifikan pertumbuhan UMKM dengan penurunan

kemiskinan yang bersifat heterogen menurut kualitas ekosistem pendampingan.

Dari perspektif teori implementasi Grindle yang menjadi landasan penelitian ini, Purwanto & Sulistyastuti, (2012) mengaplikasikannya dalam analisis perlindungan sosial di Jawa Tengah dan menemukan kapasitas pelaksana serta sumber daya sebagai variabel paling berpengaruh. As'adi et al., (2024) menggunakannya untuk mengkaji kebijakan kemiskinan dan menyimpulkan bahwa dimensi konteks implementasi khususnya kekuasaan aktor dan karakteristik Lembaga lebih determinan daripada isi kebijakan, namun terbatas hanya menganalisis sebagian indikator Grindle. Syahrudin, (2019) dalam kajian komparatifnya menyimpulkan bahwa teori Grindle lebih komprehensif dibanding teori top-down Edwards III (1980) maupun teori bottom-up Lipsky (1980) dalam menangkap kompleksitas implementasi kebijakan sosial di negara berkembang. Penulisan ini mencakup tiga hal: (1) penerapan komprehensif seluruh sembilan indikator teori Grindle sebagai kerangka diagnostik yang utuh; (2) pengisian kekosongan literatur tentang tata kelola kemiskinan spesifik Kota Lubuk Linggau; dan (3) pengembangan *Integrated Poverty Governance Framework* (IPGF) sebagai model rekomendasi kebijakan yang terlokalisasi, operasional, dan dapat segera ditindaklanjuti.

Tujuan penulisan mendiagnosis permasalahan isu melambatnya penurunan kemiskinan di Kota Lubuklinggau secara empiris, menyajikan alternatif solusi, dan memberikan rekomendasi praktis yang jelas kepada para pengambil keputusan guna menyelesaikan isu tersebut. Menyoroti hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan (*Problem Statement*) adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja sebagai dampak dari melambatnya pertumbuhan UMKM sehingga menyebabkan melambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahim et al., (2024) bahwa pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Metode pengumpulan data melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan

menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh keyperson berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya. Terakhir dilakukan pendekatan *logic model* untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan di atasnya sehingga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Maksud penulisan makalah kebijakan ini yaitu, pertama, mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau melalui sembilan indikator teori Grindle untuk menghasilkan pemetaan implementasi yang sistematis dan berbasis bukti. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi baik yang mendukung maupun menghambat serta mengeksplorasi bagaimana interaksi antar-faktor membentuk kualitas implementasi yang ada. Ketiga, menganalisis pola interaksi antar-stakeholder, mengidentifikasi hambatan koordinasi yang paling kritikal, dan mengembangkan *Integrated Poverty Governance Framework* (IPGF) sebagai model rekomendasi kebijakan yang operasional dan terlokalisasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur implementasi kebijakan publik Indonesia

melalui konfirmasi dan perluasan proposisi teori Grindle dalam konteks tata kelola kemiskinan kota menengah, sekaligus memberikan kontribusi metodologis dalam penggunaan teori implementasi sebagai kerangka yang sekaligus bersifat diagnostik dan preskriptif. Secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau khususnya Bappeda dan OPD terkait dalam upaya akselerasi penurunan angka kemiskinan menuju target RPJMD 2025 - 2029, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan yang menghadapi tantangan serupa.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep dan Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan sebagai fenomena sosial-ekonomi telah didefinisikan dari berbagai perspektif keilmuan yang semakin berkembang melampaui batasan ekonomi konvensional. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakcukupan pendapatan atau konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pendekatan yang lazim disebut kemiskinan absolut (Romi & Umiyati, 2018). Bappenas, (2004) mendefinisikannya sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Transformasi konseptual terpenting terjadi ketika Amartya Sen (1999) dalam "*Development as Freedom*" memperkenalkan *capability approach* yang mendefinisikan kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dasar bukan sekadar pendapatan rendah (Juliawan, 2012). Pandangan ini menjadi fondasi Human Development Index (HDI) UNDP (2023) yang mengukur kemiskinan pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Dulal, 2023). Alkire & Foster, (2011) mengoperasionalisasinya melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) dalam 10 indikator yang telah diadopsi Indonesia sebagai Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) nasional. Dari perspektif sosiologi, Moser, (1995) mengidentifikasi *cluster of disadvantages* yang mencakup kemiskinan materi, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan menegaskan bahwa intervensi parsial dan sektoral tidak akan memadai karena tidak menyentuh keseluruhan dimensi deprivasi. World Bank, (2022) menambahkan bahwa kemiskinan dipengaruhi faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang semuanya berinteraksi dalam ekosistem kebijakan publik yang kompleks.

Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan kronik (*chronic poverty*) yang berlangsung lama dan diwariskan lintas

generasi, kemiskinan transien (*transient poverty*) akibat guncangan seperti PHK atau pandemi, dan kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran di bawah USD 2,15 per hari menurut standar Bank Dunia (2022). Di Kota Lubuk Linggau, garis kemiskinan sebesar Rp 632.783 per kapita per bulan pada 2025 mencerminkan standar minimum subsisten yang masih di bawah kebutuhan hidup layak aktual, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin di kota ini berpotensi masuk dalam kategori kemiskinan transien yang rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi (BPS Kota Lubuklinggau, 2025).

2. Teori Implementasi Kebijakan: Landasan Komparatif

Studi implementasi kebijakan publik berkembang pesat sejak Pressman & Wildavsky, (1973) mengungkap betapa sulitnya mewujudkan tujuan kebijakan bahkan yang dirumuskan dengan sangat baik sekalipun. Van Meter & Van Horn, (1975) mengembangkan model top-down dengan enam variable yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, dan disposisi implementor. Edwards III (1980) menyederhanakannya menjadi empat variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lipsky, (2010) dari perspektif bottom-up berargumen bahwa

kebijakan pada hakikatnya dibentuk oleh *street-level bureaucrats* yang memiliki diskresi signifikan. Sabatier & Mazmanian, (1980) berusaha mensintesis keduanya dengan pendekatan *Advocacy Coalition Framework* yang menekankan peran koalisi kepentingan dalam proses implementasi jangka panjang.

3. Teori Implementasi Merilee S. Grindle (1980)

Di antara berbagai teori implementasi, model Grindle, (2017) dalam *Politics and Policy Implementation in the Third World* dipandang paling komprehensif dan relevan untuk konteks negara berkembang karena secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor politik, kelembagaan, dan kontekstual yang menentukan nasib implementasi kebijakan. Grindle memulai dari proposisi bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses teknis yang netral, melainkan proses yang sarat kepentingan, kekuasaan, dan negosiasi antar berbagai aktor.

Dimensi pertama, isi kebijakan (*content of policy*), mencakup enam elemen: (1) kepentingan yang terpengaruh (*interests affected*) sejauh mana kebijakan memperhatikan kepentingan kelompok yang beragam termasuk kelompok yang mungkin dirugikan; (2) jenis manfaat (*type of benefits*) apakah manfaat bersifat kolektif atau individual, material atau simbolis; (3) derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*) semakin besar perubahan yang

ditargetkan, semakin besar pula resistensi yang dihadapi; (4) kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*) lokus kewenangan dalam hierarki kelembagaan; (5) pelaksana kebijakan (*program implementors*) kapasitas, komitmen, dan ketepatan penugasan pelaksana; dan (6) sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*) ketersediaan dan kecukupan sumber daya finansial, manusia, serta infrastruktur.

Dimensi kedua, konteks implementasi (*context of implementation*), mencakup tiga elemen: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor (*power, interests, and strategies of actors involved*) dinamika kekuasaan dan koalisi kepentingan yang mendukung atau

menghambat implementasi; (2) karakteristik lembaga dan rezim (*characteristics of institutions and regimes*) budaya organisasi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen pemimpin; serta (3) kepatuhan dan respons pelaksana (*compliance and responsiveness*) kemauan dan kemampuan implementor mematuhi arahan kebijakan sekaligus merespons kebutuhan kelompok sasaran. Nugroho, (2014) menegaskan bahwa dalam konteks desentralisasi Indonesia, teori Grindle sangat relevan karena menangkap kompleksitas relasi pusat-daerah, dinamika politik lokal, dan variasi kapasitas birokrasi yang menjadi karakteristik utama tata kelola pemerintahan daerah pasca-reformasi.

Tabel 1

Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan

Teori / Tokoh	Perspektif	Variabel Kunci	Keunggulan Grindle
Van Meter & Van Horn (1975)	Top-Down	Standar tujuan, sumber daya, komunikasi, disposisi, kondisi sosek	Mengabaikan dinamika politik dan aktor non-pemerintah
Edwards III (1980)	Top-Down	Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi	Terlalu sederhana; kurang kontekstual untuk negara berkembang
Lipsky (1980)	Bottom-Up	Diskresi <i>street-level bureaucrats</i> , kondisi kerja, relasi klien	Mengabaikan pengaruh kebijakan dari atas dan aktor eksternal
Grindle (1980) ★	Sintesis-Kontekstual	9 indikator: 6 isi kebijakan + 3 konteks implementasi	Komprehensif, menangkap faktor politik-kelembagaan, relevan negara berkembang

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2026)

4. Kemiskinan, UMKM, dan Kebijakan Pengentasan Nexus Regulasi

Keterkaitan antara pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan telah mendapat perhatian besar dalam literatur pembangunan ekonomi. Tambunan, (2012) menegaskan bahwa UMKM di Indonesia menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Pengembangan UMKM secara struktural mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan karena UMKM bersifat padat karya, berbasis sumber daya lokal, dengan nilai investasi per tenaga kerja yang rendah. Nursasi et al., (2024) mengidentifikasi hambatan struktural keterbatasan akses pembiayaan formal, lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya adopsi teknologi digital, dan belum terintegrasinya UMKM dalam rantai nilai industri. *Strategi Resource Based View* (RBV) yang dikembangkan Barney, (1991) melalui analisis VRIO memberikan kerangka untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis sumber daya lokal yang relevan bagi pengembangan UMKM di daerah.

Dalam hierarki regulasi, arsitektur kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia dibangun di atas Pasal 34 UUD 1945, dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM, Perpres Nomor 15 Tahun 2010, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Secara programatik, strategi

nasional diorganisasi dalam empat klaster perlindungan sosial (PKH, BPNT, PIP, KIS); pemberdayaan masyarakat (Dana Desa); pemberdayaan UMKM (KUR, pendampingan); dan subsidi (pangan, listrik, BBM). Adelman, (2001) mengingatkan bahwa pendekatan multi-klaster efektif dalam kondisi pertumbuhan ekonomi stabil, namun menjadi tidak optimal ketika koordinasi antar-klaster lemah sebuah temuan yang sangat relevan dengan konteks implementasi di Kota Lubuk Linggau.

5. Koordinasi Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan

Rhodes, (1997) memperkenalkan *governance networks* sebagai paradigma baru di mana implementasi kebijakan dipahami sebagai hasil interaksi dan negosiasi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang masing-masing memiliki sumber daya dan kepentingan berbeda. Cahyono, (2026) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi modern bergantung pada kualitas governance kemampuan para aktor berkoordinasi dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, Dafa & Dafa, (2026) menemukan bahwa fragmentasi kelembagaan, inkonsistensi kebijakan lintas tingkatan pemerintahan, dan lemahnya akuntabilitas horizontal menjadi hambatan utama program penanggulangan kemiskinan. Penguatan koordinasi antar-stakeholder karenanya bukan sekadar persoalan teknis

administratif, melainkan tantangan tata kelola yang memerlukan solusi kelembagaan yang fundamental dan inilah yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitik melalui strategi studi kasus tunggal mendalam (*single intensive case study*) sebagaimana dikembangkan Yin, (2018). Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan epistemologis bahwa fenomena implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi semata menjadi angka-angka (Creswell & Creswell, 2017). Studi kasus Kota Lubuk Linggau dipilih bukan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk menghasilkan generalisasi analitik (*analytical generalization*) pengayaan dan pengujian teori Grindle melalui konfrontasi dengan realitas empiris spesifik. Moleong, (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah. Desain deskriptif-analitik dipilih karena penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi menganalisisnya secara sistematis

menggunakan kerangka Grindle untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola, hubungan, dan mekanisme yang mendasari implementasi kebijakan.

2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan alat analisis metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), yaitu teknik penilaian scoring untuk menentukan prioritas masalah atau isu utama (Nurfarahin et al., 2025). Metode ini menggunakan skala likert 1-5, di mana masalah dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Metode ini sering digunakan dalam manajemen, organisasi, atau pelayanan publik untuk menapis banyak isu agar fokus pada masalah yang paling mendesak. Tiga komponen utama yang dinilai (dengan skala 1-5) meliputi: Urgency (U): Seberapa mendesaknya masalah tersebut harus segera dibahas, ditindaklanjuti, dan dihindari penundaannya. Seriousness (S): Seberapa serius dampak masalah tersebut terhadap kinerja, kerugian, atau bahaya yang ditimbulkannya. Growth (G): Seberapa besar kemungkinan masalah tersebut akan memburuk atau berkembang jika tidak segera ditangan. Masalah dengan total skor tertinggi akan menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Langkah-langkah penggunaan

metode ini dalam penelitian meliputi

- 1) Mengidentifikasi beberapa isu atau masalah utama yang ditemukan di lapangan
- 2) Memberikan skor antara 1 sampai 5 untuk setiap kriteria U, S, dan G pada masing-masing isu,
- 3) Menjumlahkan skor total dari ketiga kriteria tersebut,
- 4) Mengurutkan isu dari skor tertinggi hingga terendah untuk menentukan prioritas utama penyelesaian.

3. Unit Analisis dan Informan

Penelitian ini menetapkan organisasi pemerintah daerah sebagai unit analisis utama, khususnya organisasi-organisasi yang secara langsung terlibat dalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau, dengan fokus pada Bappeda sebagai koordinator perencanaan strategis dan OPD teknis pelaksana yaitu Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria memiliki

pengetahuan mendalam tentang kebijakan kemiskinan, terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan program, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka (Patton, 2002). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan bermakna dari individu-individu yang benar-benar memiliki kapasitas serta pengalaman langsung terkait objek penelitian. Dua belas informan kunci dipilih mencakup pejabat struktural di tingkat eselon II-IV dari seluruh OPD terkait, ditambah dua perwakilan penerima manfaat sebagai triangulasi perspektif dari sisi kelompok sasaran. Saturasi data dicapai pada wawancara ke-10 dan dikonfirmasi melalui dua wawancara tambahan.

Terkait kecukupan data, saturasi informasi tercapai pada wawancara ke-10, yang ditandai dengan tidak munculnya tema atau informasi baru yang signifikan dari informan berikutnya. Untuk memastikan bahwa saturasi tersebut benar-benar telah terpenuhi dan bukan sekadar kesan sementara, peneliti melakukan dua wawancara tambahan sebagai konfirmasi.

Tabel 2
Profil Informan Penelitian

No	Jabatan / Posisi	Instansi	Kode	Teknik
1	Kepala Bappeda	Bappeda Kota Lubuk Linggau	I-01	Wawancara
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda	Bappeda	I-02	Wawancara
3	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	I-03	Wawancara
4	Kepala Bidang Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	I-04	Wawancara
5	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi & UMKM	I-05	Wawancara
6	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi & UMKM	I-06	Wawancara
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	I-07	Wawancara
8	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	I-08	Wawancara
9	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	I-09	Wawancara
10	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	I-10	Wawancara
11–12	Penerima Manfaat Program (triangulasi)	Masyarakat	I-11, I-12	Wawancara

Sumber: Rancangan Penelitian (2026)

4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif pengamatan langsung terhadap mekanisme koordinasi TKPKD, rapat perencanaan program, dan pelaksanaan program di lapangan dalam setting alamiah tanpa manipulasi kondisi (Patton, 2002). Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan dari operasionalisasi sembilan

indikator teori Grindle, berlangsung 60 - 90 menit per sesi, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsikan verbatim; teknik probing digunakan untuk mendalami jawaban dan mengeksplorasi dimensi yang tidak terduga. Ketiga, studi dokumentasi terhadap RPJMD 2025 - 2029, laporan kinerja OPD 2020-2025, data statistik kemiskinan BPS, DTKS, dokumen rencana aksi TKPKD, regulasi nasional dan daerah, serta laporan evaluasi program dengan analisis dokumen

tidak hanya mengkaji isi, tetapi juga konteks produksi dan distribusinya.

5. Analisis Data dan Keabsahan

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al., (2014) yang berlangsung secara simultan dan iteratif melalui empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data (pemilihan dan transformasi data mentah), penyajian data (teks naratif, matriks, bagan), dan penarikan-verifikasi kesimpulan. Proses pengkodean dilakukan

dengan *open coding* (identifikasi tema awal), *axial coding* (pengelompokan tema ke kategori), dan *selective coding* (integrasi kategori ke konstruk teori utama). Seluruh temuan dipetakan ke dalam sembilan indikator teori Grindle. Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria Guba & Lincoln, (1994) kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking; transferabilitas melalui thick description dengan ketergantungan melalui audit trail dan konfirmabilitas melalui reflektivitas peneliti.

Tabel 3

Operasionalisasi Variabel dengan Sembilan Indikator Teori Grindle (1980)

No	Dimensi / Variabel	Indikator Operasional	Aspek yang Diteliti	Sumber Data
1	Kepentingan yang Terpengaruh	Representasi kelompok sasaran dalam perencanaan	Keterlibatan masyarakat miskin, UMKM, pengangguran dalam forum perencanaan	Wawancara, Observasi
2	Jenis Manfaat	Proporsi bantuan sosial vs. pemberdayaan struktural	Alokasi anggaran, jenis program, durasi manfaat	Dokumen, Wawancara
3	Kedalaman Perubahan	Target transformasi struktural vs. Inkremental	Indikator RPJMD, target program, logika perubahan	Dokumen
4	Kedudukan Pengambil Keputusan	Lokus kewenangan; sinkronisasi Bappeda-OPD	Fragmentasi kewenangan, mekanisme koordinasi perencanaan	Wawancara, Observasi
5	Kapasitas Pelaksana	SDM, rasio pendamping, kompetensi teknis	Jumlah tenaga pendamping, pelatihan, pengalaman	Dokumen, Wawancara
6	Sumber Daya	Anggaran, infrastruktur, sistem informasi	Alokasi anggaran M&E, ketersediaan data terpadu	Dokumen
7	Kekuasaan & Strategi Aktor	Dinamika kepentingan, ego sektoral, koalisi	Pola koordinasi, konflik kepentingan, perilaku OPD	Wawancara, Observasi

No	Dimensi / Variabel	Indikator Operasional	Aspek yang Diteliti	Sumber Data
8	Karakteristik Lembaga	Budaya birokrasi, komitmen pemimpin, orientasi	Compliance vs. impact orientation, inovasi program	Wawancara, Observasi
9	Kepatuhan & Respons Pelaksana	Diskresi, responsivitas terhadap sasaran	Service rationing, akses kelompok miskin ke program	Wawancara, Observasi

Sumber: Adaptasi dari Grindle (1980), diolah peneliti

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kemiskinan Kota Lubuk Linggau

Pemahaman mendalam tentang profil kemiskinan merupakan prasyarat untuk menganalisis efektivitas strategi kebijakan

yang diterapkan. Data BPS Kota Lubuklinggau (2025) menggambarkan kondisi kemiskinan yang fluktuatif dengan akselerasi penurunan yang tidak konsisten dan rentan terhadap guncangan eksternal.

Tabel 4

Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Lubuk Linggau 2019–2025

Tahun	Kemiskinan (%)	Penduduk Miskin (000 jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)	TPT (%)	Rata-rata Lama Sekolah (thn)
2019	12,40	29,10	520.450	6,12	7,34
2020	12,71	30,20	541.200	7,41	7,52
2021	13,23	31,50	556.890	6,27	7,68
2022	12,68	30,10	578.340	5,94	7,79
2023	12,65	29,80	601.230	5,64	7,95
2024	11,14	27,50	614.500	5,24	8,11
2025	10,49	26,36	632.783	—	—

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (2019–2025); TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Data di atas mengungkap tiga fenomena penting. Pertama, lonjakan angka kemiskinan 2020-2021 (dari 12,40% menjadi

13,23%) merupakan dampak nyata pandemi COVID-19 yang menghantam sektor UMKM dan tenaga kerja informal mengonfirmasi

konsep kerentanan (vulnerability) Chambers (1994) sebagai dimensi kritis kemiskinan. Kedua, penurunan relatif tajam 2023 - 2024 (1,51 poin persentase) berkorelasi dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan percepatan program bansos nasional. Ketiga, laju penurunan rata-rata 0,033 poin per tahun masih jauh dari kebutuhan 1,5-2 poin per tahun untuk mencapai target RPJMD mengindikasikan kemiskinan struktural yang tidak dapat diselesaikan tanpa intervensi kebijakan yang lebih sistemik dan akseleratif.

2. Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

Percepatan Penurunan Kemiskinan

a. Kerangka Regulasi dan Gap Implementasi

Pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau secara normatif bertumpu pada hierarki regulasi yang komprehensif dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Inpres Nomor 8 Tahun 2025, dan RPJMD 2025-2029 dengan target penurunan di bawah 8% dalam empat tahun. Namun wawancara mendalam dengan Kepala Bappeda (I-01) mengungkap realitas yang lebih kompleks yaitu "Secara regulasi, fondasi kita sangat kuat. Masalahnya ada di gap antara regulasi dengan implementasi. Setiap OPD memahami tugas dan fungsinya, tetapi sinkronisasi antar-OPD dalam satu ekosistem pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar." Analisis dokumen RPJMD

dan rencana kerja OPD mengidentifikasi 47 kegiatan terkait kemiskinan yang tersebar di sembilan OPD dengan total anggaran gabungan Rp 87,3 miliar per tahun. Namun hanya 12 kegiatan (25,5%) yang memiliki indikator output terhubung langsung dengan indikator penurunan kemiskinan selebihnya menggunakan indikator administratif yang tidak mencerminkan dampak substantif.

b. Lima Klaster Program dan Evaluasinya

Penelitian mengidentifikasi lima klaster program yaitu (1) perlindungan sosial PKH (10.234 KPM), BPNT (12.870 KPM), PIP (8.940 siswa), dan KIS (25.600 jiwa), yang menghadapi tantangan ketepatan sasaran akibat inkonsistensi DTKS; (2) pemberdayaan UMKM pendampingan, KUR, pelatihan, dan pemberian modal Rp 2.000.000,- per UMKM sesuai RPJMD 2025-2029; (3) pengembangan SDM melalui beasiswa daerah, pelatihan vokasi, dan BLK; (4) layanan kesehatan dasar melalui JKN-PBI dan posyandu; serta (5) infrastruktur pro-poor (RTLH, sanitasi, air bersih). Kepala Dinas Sosial (I-03) mengungkapkan bahwa "Data DTKS kami masih belum sepenuhnya akurat. Ada warga yang seharusnya menerima tapi tidak dapat, ada yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih dapat. Pemutakhiran data belum berjalan optimal." Pernyataan ini mengonfirmasi temuan Sumarto & Bazzi, (2011) tentang *exclusion-inclusion error* sebagai hambatan sistemik dalam penyaluran bantuan sosial.

c. *Mekanisme TKPKD: Koordinasi Formal dan Praktik Aktual*

TKPKD Kota Lubuk Linggau dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota, diketuai Wakil Walikota dengan Bappeda sebagai sekretariat. Secara normatif bertugas mengoordinasikan program lintas OPD, memantau pelaksanaan, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Namun observasi lapangan dan konfirmasi Sekretaris Daerah (I-10) mengungkap kesenjangan signifikan dimana TKPKD rata-rata bersidang hanya 2-4 kali per tahun dengan agenda yang didominasi pelaporan capaian sektoral, bukan diskusi substantif tentang integrasi program atau evaluasi dampak. Kepala Bidang Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Bappeda (I-02) menegaskan "Forum TKPKD idealnya menjadi tempat memutuskan bersama bagaimana mengintegrasikan program. Tapi dalam praktiknya, setiap OPD datang dengan laporan sendiri-sendiri dan pulang dengan agenda sendiri-sendiri. Tidak ada mekanisme yang memaksa integrasi." Kondisi ini secara langsung mencerminkan disfungsi pada komponen kekuasaan dan strategi aktor dalam dimensi konteks implementasi Grindle.

3. Analisis Faktor-Faktor Berdasarkan Sembilan Indikator Grindle

Berdasarkan kerangka teori Grindle (1980), analisis terhadap seluruh data lapangan

menghasilkan pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Pada indikator kepentingan yang terpengaruh, kelompok sasaran utama memiliki representasi sangat terbatas dalam proses perencanaan mekanisme konsultasi publik bersifat prosedural, bukan substantif. Grindle (1980) memprediksi bahwa semakin tidak terwakilinya kepentingan kelompok sasaran dalam proses perumusan, semakin besar risiko kebijakan tidak sesuai kebutuhan aktual lapangan. Pada indikator jenis manfaat, 39,5% dari total anggaran program kemiskinan dialokasikan untuk bantuan sosial langsung dan hanya 21,4% untuk pemberdayaan ekonomi produktif mencerminkan apa yang disebut sebagai *social protection trap*, di mana desain program lebih condong pada *consumption smoothing* jangka pendek ketimbang *asset building* jangka panjang (Devereux et al., 2002).

Pada indikator kedalaman perubahan, analisis RPJMD 2025 - 2029 menunjukkan target yang ambisius tanpa disertai strategi transformasi struktural yang eksplisit tidak ada peta jalan perubahan yang menyentuh dimensi redistribusi aset, mobilitas ekonomi, atau kemandirian kelompok rentan. Pada indikator kedudukan pengambil keputusan, terdapat dispersi kewenangan antara Bappeda sebagai perencana strategis dan OPD teknis sebagai pelaksana tanpa mekanisme integrasi yang efektif. Bardach (1977) menyebut kondisi ini

sebagai *implementation game* setiap aktor memaksimalkan kepentingan sektoral masing-masing sehingga tujuan kebijakan keseluruhan menjadi subordinat (Goggin, 2022). Pada indikator kapasitas pelaksana yang merupakan temuan paling kritis hanya tersedia empat tenaga pendamping UMKM untuk melayani 18.420 unit UMKM yang terdaftar, menghasilkan rasio 1:4.605 yang jauh dari standar minimal. Lipsky, (2010) memprediksi bahwa *overload* semacam ini mendorong pelaksana mengembangkan mekanisme coping yang mengkompromikan kualitas layanan. Pada indikator sumber daya, anggaran program tersebar di sembilan OPD tanpa konsolidasi yang memadai, sementara alokasi untuk monitoring dan evaluasi berbasis dampak hanya 1–2% dari total anggaran mengakibatkan lemahnya *evidence base* untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti.

Pada indikator kekuasaan dan strategi aktor, ego sektoral yang kuat diperparah oleh sistem insentif LAKIP yang bersifat *sectoral* secara tidak sengaja menciptakan disinsentif untuk koordinasi lintas OPD. Kepala Bidang Perlindungan Sosial (I-04) mengungkapkan: "Kami sering menghadapi potensi sinergi

dengan OPD lain, tapi masing-masing punya target dan indikator sendiri. Kalau kami berkolaborasi, siapa yang dapat angka prestasinya?" Pada indikator karakteristik lembaga, budaya birokrasi yang *compliance-oriented* dibandingkan *impact-oriented* menjadi hambatan fleksibilitas dan inovasi yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan. Namun komitmen politik kepala daerah yang tinggi tercermin dalam RPJMD merupakan modal yang belum sepenuhnya dikapitalisasi. Pada indikator kepatuhan dan respons pelaksana, tingkat kepatuhan prosedural aparatur relatif baik, namun responsivitas terhadap kebutuhan aktual masyarakat miskin masih lemah. Informan penerima manfaat (I-11) mengungkapkan: "Saya tahu ada program modal usaha, tapi syaratnya banyak dan tidak jelas. Akhirnya saya menyerah." Kondisi ini mencerminkan *service rationing* Lipsky, (2010) kompleksitas prosedural secara efektif menyaring penerima manfaat sehingga yang paling membutuhkan tidak selalu berhasil mengakses program.

Tabel 5

Matriks Analisis Implementasi: Sembilan Indikator Teori Grindle

Indikator Grindle	Temuan Penelitian	Implikasi	Kondisi	Dampak
<i>Interests Affected</i>	Representasi kelompok miskin terbatas; dominasi kepentingan OPD	Kebijakan tidak sepenuhnya selaras kebutuhan aktual sasaran	Lemah	Signifikan

Indikator Grindle	Temuan Penelitian	Implikasi	Kondisi	Dampak
<i>Type of Benefits</i>	Bansos 39,5% anggaran; pemberdayaan hanya 21,4%	Short-term focus; tidak transformatif; social protection trap	Sedang	Moderat
<i>Extent of Change</i>	Target ambisius tanpa strategi transformasi struktural eksplisit	Gap antara aspirasi kebijakan dan kapasitas implementasi aktual	Lemah	Signifikan
<i>Site of Decision</i>	Dispersi kewenangan; Bappeda tidak punya otoritas operasional	Implementation game; fragmentasi dan inefisiensi program	Lemah	Signifikan
<i>Program Implementors</i>	Rasio pendamping 1:4.605; kapasitas tidak merata	Kualitas dan jangkauan layanan pendampingan sangat terbatas	Kritis	Sangat Signifikan
<i>Resources Committed</i>	Anggaran terfragmentasi; M&E hanya 1–2%	Evidence base lemah; efisiensi penggunaan sumber daya rendah	Lemah	Signifikan
<i>Power & Interests</i>	Ego sektoral kuat; LAKIP tidak mendorong kolaborasi	Koordinasi TKPKD formalistik; sinergi program minimal	Kritis	Sangat Signifikan
<i>Inst. Characteristics</i>	Budaya prosedural; namun komitmen kepala daerah positif	Potensi reformasi ada; perlu akselerasi kelembagaan	Sedang	Moderat
<i>Compliance & Resp.</i>	Kepatuhan prosedur baik; responsivitas terhadap sasaran kurang	Service rationing menghambat akses kelompok termiskin	Sedang	Moderat

Keterangan: Kritis = Hambatan Paling Mendesak; Lemah = Hambatan Signifikan; Sedang = Tantangan Moderat

4. Interaksi Stakeholder: Peta, Pola, dan Hambatan Koordinasi

Pemetaan stakeholder menggunakan matriks *power-interest* Mendelow, (1991) menghasilkan pengelompokan *Key Players* (Walikota, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi-UMKM, DPRD) yang harus dikelola secara aktif yaitu *Keep Satisfied* (Pemprov

Sumsel, Kemensos, TNP2K) yang dijaga kepuasannya; *Keep Informed* (kelompok miskin, UMKM, LSM) yang harus terus diinformasikan; dan Monitor (akademisi, media) yang dipantau. Tiga pola interaksi ditemukan dengan interaksi vertikal antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat yang relatif terstruktur namun cenderung satu arah

yaitu interaksi horizontal antar-OPD melalui TKPKD yang paling kritikal namun paling bermasalah dan interaksi diagonal antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat sipil yang paling lemah keterlibatan CSR belum terkoordinasi sistematis dengan program pemerintah.

Empat hambatan koordinasi paling kritikal teridentifikasi. Pertama, inkonsistensi data kemiskinan setiap OPD menggunakan basis data yang berbeda (DTKS, data BPS, data mandiri), mengakibatkan tumpang tindih sasaran dan *exclusion error* yang signifikan. Kedua, tidak adanya mekanisme evaluasi bersama yang sistematis evaluasi dilakukan secara sektoral tanpa pengukuran dampak kumulatif. Ketiga, ketidaksesuaian siklus perencanaan dengan kebutuhan program pemberdayaan jangka menengah yang memerlukan kontinuitas minimal tiga tahun. Keempat, tidak adanya unit khusus untuk mengelola kemitraan multi-pihak yang melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil secara terpadu. Hambatan-hambatan ini secara kolektif membentuk apa yang dikatakan Rhodes, (1997) sebagai *governance deficit* ketidakmampuan jaringan aktor untuk menghasilkan koordinasi yang mengoptimalkan sumber daya kolektif menuju tujuan bersama.

Berdasarkan konsep Resource Base View (RBV) maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan

mempertimbangkan *technical feasibility*, *economic* dan *financial possibility*, *political viability*, serta *administrative operatibility* (Luger, 2001). Alternatif kebijakan yang pertama adalah pendampingan pembinaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berfokus pada digitalisasi, legalitas instan, akses permodalan dan metode partisipatif untuk mempercepat UMKM naik kelas. Tujuan dari pendampingan dan pembinaan ini diharapkan meningkatnya kapasitas, daya saing, dan kinerja usaha agar berkelanjutan dan mampu "naik kelas". Pendampingan ini berperan krusial dalam memperkuat kemandirian UMKM melalui peningkatan keterampilan manajerial, teknis produksi, dan akses pemasaran. Upaya pengembangan ini bertujuan agar dapat memberdayakan UMKM melalui bimbingan, pendampingan, pemberian fasilitas, dan bantuan untuk menumbuhkan kemampuan daya saing. Mengingat keberadaan UMKM maka UMKM sangat perlu untuk diberdayakan oleh pemerintah karena keberadaan UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial masyarakat khususnya dalam mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan.

Alternatif kebijakan kedua adalah mendorong UMKM mengadopsi teknologi modern dan memanfaatkan platform *e-commerce* untuk perluasan pasar. Tujuan pemanfaatan *e-commerce* ini diharapkan UMKM dapat memperluas jangkauan pasar secara global, meningkatkan penjualan melalui

efisiensi operasional, serta membangun brand awareness. Teknologi ini memungkinkan UMKM menekan biaya operasional, beradaptasi dengan tren digital, dan mempercepat adopsi transaksi less cash yang efisien. *E-commerce* juga penting dalam penghematan pengeluaran biaya UMKM. Dibandingkan dengan toko fisik, biaya operasional untuk menjalankan bisnis melalui *e-commerce* jauh lebih murah. UMKM dapat mengurangi biaya sewa tempat, gaji karyawan, hingga biaya operasional lainnya. Sehingga biaya tersebut dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan produksi dan kebutuhan penting lainnya.

Alternatif kebijakan yang ketiga adalah pemberian insentif fiskal daerah bagi UMKM dalam bentuk pembebasan pajak daerah (pajak hotel/restoran/parkir), pengurangan pajak, atau penundaan setoran, bertujuan meningkatkan likuiditas, daya saing, dan mendorong digitalisasi usaha kecil. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, yang memungkinkan daerah memberikan keringanan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban pajak membantu UMKM mempertahankan arus kas, mendorong UMKM mengembangkan teknologi, produk, dan pemasaran dan

membantu UMKM bertahan, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil.

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 oleh *keyperson* di lingkungan OPD Bappeda Kota Lubuklinggau yaitu pejabat Eselon II dan III berdasarkan pendekatan *Resource Base View* (RBV) (Muharam, 2017). Pendekatan ini mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

Tabel 6
skoring alternatif kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka panjang	Skor Total
Pendampingan pembinaan UMKM	5	5	5	15
Mendorong UMKM mengadopsi teknologi modern	3	3	4	10
Pemberian insentif fiskal daerah bagi UMKM	4	3	5	12

Berdasarkan hasil skoring di atas, pendampingan pembinaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah kebijakan dengan skor tertinggi. Upaya konkrit pendampingan UMKM naik kelas meliputi legalitas usaha (NIB, sertifikasi halal/PIRT), pelatihan manajemen keuangan, dan digitalisasi pemasaran (*QRIS, marketplace*)

serta rebranding produk. Pendampingan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dan swasta, dengan mentoring berkelanjutan untuk meningkatkan omzet dan jangkauan pasar. Pendampingan UMKM adalah proses intervensi yang dilakukan oleh lembaga atau individu terlatih untuk menguatkan kemandirian usaha, berdasar potensi masing masing pelaku. Proses ini harus berkelanjutan dengan indikator capaian yang jelas dan berbasis data, sehingga dampaknya nyata dalam peningkatan omzet, kualitas produk, dan perluasan pasar. Selanjutnya pendampingan menekankan pada profesionalisme manajemen usaha meliputi perencanaan strategis, pencatatan keuangan yang rapi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Melalui workshop bisnis plan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan mentoring manajerial, UMKM belajar mengambil keputusan berbasis data dan proyeksi keuangan, bukan sekadar insting. Legalitas usaha pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan hak kekayaan intelektual adalah fondasi agar UMKM mendapatkan perlindungan hukum, akses kredit, dan peluang kolaborasi dengan korporasi atau pemerintah. Pendamping membantu pelaku UMKM memahami serta menuntaskan seluruh proses perizinan, sehingga usaha berjalan aman dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal. Pendampingan UMKM bukan sekadar “guru” atau

“konsultan”; mereka adalah motivator, fasilitator jaringan, dan jembatan ke sumber daya mulai permodalan hingga pengembangan pasar. Lewat kunjungan lapangan, sesi konsultasi bisnis *one on one*, serta pelatihan kelompok, pendamping membantu pelaku UMKM : 1) menyusun roadmap bisnis yang realistis, 2) memperbaiki desain produk dan kemasan, 3) mengelola cash flow dan neraca sederhana, 4) membangun jejaring pelanggan dan mitra distribusi, 5) mengakses pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan mikro.

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan kerangka sembilan indikator teori implementasi Grindle (1980), dapat ditarik tiga kesimpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau secara normatif memiliki landasan regulasi yang kuat dan program yang beragam, namun menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan. Dari sembilan indikator Grindle, enam berada dalam kondisi lemah hingga kritis yaitu keterwakilan kepentingan kelompok miskin terbatas, dominasi bantuan sosial atas pemberdayaan struktural (39,5% vs 21,4% anggaran), target perubahan yang tidak didukung strategi transformatif, dispersi kewenangan antara Bappeda dan OPD teknis, rasio pendampingan UMKM yang tidak memadai (1:4.605), dan

fragmentasi anggaran dengan monitoring dan evaluasi yang sangat minim.

Kedua, faktor penghambat implementasi bersifat sistemik dan saling memperkuat. Dimensi konteks implementasi khususnya ego sektoral OPD yang diperparah oleh sistem LAKIP yang tidak mendorong kolaborasi, dan budaya birokrasi yang lebih *compliance-oriented* daripada *impact-oriented* terbukti lebih determinan daripada dimensi isi kebijakan dalam menentukan kualitas implementasi aktual.

Ketiga, koordinasi antar-stakeholder masih didominasi pola fragmentatif dan sektoral. Mekanisme TKPKD belum berfungsi sebagai platform integrasi yang efektif, keterlibatan sektor non-pemerintah bersifat *ad hoc* dan tidak terlembagakan, serta inkonsistensi data kemiskinan lintas OPD menjadi hambatan paling fundamental dalam memastikan ketepatan sasaran program. Keseluruhan temuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa percepatan penurunan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau memerlukan solusi kelembagaan yang fundamental bukan sekadar penambahan program atau anggaran berupa reformasi tata kelola yang mengintegrasikan koordinasi, data, kapasitas, dan kemitraan dalam satu ekosistem kebijakan yang koheren.

Beberapa langkah dalam mengimplementasikan kebijakan

pendampingan dan pembinaan UMKM dapat diuraikan tahapan - tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi (Pembentukan/Diagnosa). Tahap ini merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan nyata UMKM. Membangun Relasi (*Trust Building*): Pendamping menjalin hubungan dan menyamakan persepsi dengan pelaku UMKM. Identifikasi permasalahan (Diagnosa), analisis kondisi internal dan eksternal UMKM untuk menemukan masalah utama (misalnya: modal, pemasaran, legalitas, atau SDM). Asesmen Kebutuhan: Mengisi formulir atau melakukan kunjungan lapangan untuk memetakan kebutuhan spesifik.

2. Tahap Perencanaan Pendampingan (*Action Planning*). Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja yang terstruktur. Penyusunan Rencana Pendampingan (RRP): Menyusun materi pelatihan, teknik, dan jadwal pendampingan yang disepakati bersama. Kontrak Pendampingan: Membuat kesepakatan tertulis maupun lisan terkait tanggung jawab pendamping dan UMKM.

3. Tahap Pelaksanaan Pendampingan (*Implementation*). Pelaksanaan pendampingan dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun, seringkali melalui pendekatan praktik langsung (*learning by doing*). Pelatihan dan

Pelatihan Teknis: Meliputi legalitas usaha, pelaporan keuangan, pemasaran digital, hingga peningkatan kapasitas SDM. Pendampingan Intensif: Pendamping memberikan arahan langsung di lokasi usaha untuk mengatasi kendala operasional secara langsung. Pelatihan Manajemen: Mengubah mindset pelaku UMKM menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pasar.

4. Tahap Monitoring (*Monitoring*). Monitoring dilakukan secara berkala selama proses pendampingan berjalan untuk memastikan kegiatan sesuai jalur (*on track*). Kunjungan Lapangan/Pendampingan Daring: Pertemuan rutin atau diskusi untuk memantau implementasi hasil pelatihan. Koreksi Arah: Memperbaiki metode pendampingan jika dirasa tidak efektif di tengah jalan.

5. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (*Evaluation & Sustainability*). Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dan dampak pendampingan melalui strategi : a) Evaluasi kuantitatif & kualitatif. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan (misalnya: peningkatan omzet, kepemilikan izin, perubahan mindset, permodalan), b) Evaluasi Perubahan Perilaku. Meliputi menilai sejauh mana pelaku UMKM mengadopsi praktik manajerial baru. c) Pendampingan Lanjutan. Merencanakan pendampingan lanjutan (*mentoring*) untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) UMKM agar bisa naik kelas.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan disintesis ke dalam *Integrated Poverty Governance Framework* (IPGF) yang terdiri dari lima pilar yang saling mendukung:

1. Penyusunan dan penetapan kerangka peraturan kepala daerah dan ketentuan yang mengatur tata kelola dan manajemen pelaksanaan program sebagai pedoman yang mengatur prosedur pelaksanaan kebijakan dan pembagian peran dan tugas beberapa stakeholder dalam Upaya pendampingan pembinaan UMKM;
2. Pembangunan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKT). Satu basis data kemiskinan terintegrasi yang dapat diakses seluruh OPD terkait, mengintegrasikan DTKS, data UMKM, data ketenagakerjaan, dan data pendidikan-kesehatan. SIKT menjadi prasyarat ketepatan sasaran dan evaluasi berbasis bukti yang tidak dapat ditawar.
3. Pendirian Rumah UMKM dengan Sistem Pendampingan Terstruktur. Rumah UMKM di bawah Dinas Koperasi dan UMKM dengan tenaga pendamping profesional berstatus non-ASN yang direkrut dari sarjana lokal, rasio minimal 1:100 UMKM. Fungsi mencakup: legalitas usaha (NIB, sertifikasi halal/PIRT), pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi pemasaran (QRIS, marketplace), dan akses

permodalan. Legalitas dikuatkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

4. Pelembagaan Kemitraan Multi-Pihak. Forum kemitraan formal yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan LSM dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-evaluasi program kemiskinan. Forum ini menjadi wadah mobilisasi sumber daya non-APBD dan pengetahuan teknis yang sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan program.
5. Reformasi Sistem Insentif Kinerja OPD. Merevisi indikator kinerja LAKIP dengan menambahkan indikator kolaborasi lintas OPD dan indikator dampak pengentasan kemiskinan, sehingga sistem insentif mendorong bukan menghambat sinergi antar-OPD. Peningkatan alokasi anggaran monitoring dan evaluasi berbasis dampak minimal 5% dari total anggaran program kemiskinan.

Kelima pilar IPGF yang telah dijelaskan diimplementasikan secara simultan dan saling menguatkan. Reformasi TKPKD tanpa SIKT akan kehilangan basis data untuk pengambilan keputusan yang kredibel. SIKT tanpa reformasi insentif tidak akan digunakan secara optimal oleh OPD. Rumah UMKM tanpa kemitraan multi-pihak akan kekurangan sumber daya teknis dan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralisation, economic growth and income inequality on poverty rate of Indonesia's 3 provinces. *International Journal of Advanced Research*, 4(2), 405–414.
- Abidin, J., Octaviani, R., & Nasdian, F. T. (2013). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Bogor, Studi Kasus Di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 2(2).
- Adelman, I. (2001). Fallacies in development theory and their implications for policy. *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*, (s 1).
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487.
- As' adi, D., Rozikin, M., & Khabibi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Berdasarkan Perspektif Grindle (Studi di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 181–190.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8.
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Maret 2025 sebesar 10,49*.
- Bank, W. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank.
- Bappenas. (2004). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

- Buni, N. L., Sangadji, M., Aini, K., Aini, S. N., Aisyah, H., Parianom, R., Elsera, M., Hamson, Z., & da Costa Magno, J. (2025). *BUKU KEMISKINAN DAN KETIDAKSETARAAN*. Penerbit Widina.
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14–19.
- Chairani, N., Zasmin, N., Raisuli, R., & Rosidi, A. R. (2025). Peran sektor UMKM dalam menekan inflasi dan menyerap tenaga kerja di Surabaya. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 57–66.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dafa, P. A. H., & Dafa, D. (2026). Dinamika Tata Kelola dan Akurasi Penargetan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6950–6957.
- Devereux, M. P., Griffith, R., & Klemm, A. (2002). Corporate income tax reforms and international tax competition. *Economic Policy*, 17(35), 449–495.
- Dulal, T. D. (2023). Status of human development index with reference to Nepal. *Journal of Population and Development*, 4(1), 166–180.
- Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., & Susanti, P. (2025). Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 11–20.
- Goggin, M. L. (2022). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes Law*. Massachusetts: Second Printing. MIT Press.
- Derthick, M. (1972). *Towns in Town. Why a Federal Program Failed*. Washington, DC: Urban Institute.
- BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*, 168.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=EWafAQAACAAJ>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of Qualitative Research*, 2(163–194), 105.
- Harahap, L. M., Aulia, D., Tambunan, I. P., Nurbani, K., & Hutapea, M. N. (2025). Pengaruh peran UMKM dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 70–77.
- Juliawan, B. H. (2012). The Question Of Identity In Amartya Sen's Capability Approach. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 11(1), 2–19.
- Lee, B. X., Kjaerulf, F., Turner, S., Cohen, L., Donnelly, P. D., Muggah, R., Davis, R., Realini, A., Kieselbach, B., & MacGregor, L. S. (2016). Transforming our world: implementing the 2030 agenda through sustainable development goal indicators. *Journal of Public Health Policy*, 37(Suppl 1), 13–31.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.
- Luger, M. I. (2001). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving By Eugene Bardach 102 pp., incl. 2 appendices. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 3(3), 339–347.
- Mendelow, A. (1991). Stakeholder mapping. *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, 2.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.

- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi)* Yogyakarta.
- Moser, C. O. N. (1995). Urban social policy and poverty reduction. *Environment and Urbanization*, 7(1), 159–172.
- Muharam, D. R. (2017). Penerapan konsep resources-based view (RBV) dalam upaya mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 82–95.
- Nugroho, R. (2014). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Nurfarahin, N., Abidin, A. R., & Rachmadhina, R. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Simrs pada Unit Nurse Station Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center Tahun 2024. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 93–106.
- Nursasi, A., Hanifah, N., Handani, R. T., & Sarpini, S. (2024). Implementasi kebijakan integrasi ekonomi dan dampaknya terhadap pengembangan umkm di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 429–440.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks. *Cal.: Sage Publications*, 4(10.4135), 9781452226058.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation* (Vol. 708). Univ of California Press.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, etc.* University of California P.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Analisis Kebijakan Publik. *Gave Media, Jakarta*.
- Putra, A. W. T. Y., Puspaningtyas, A., & Soesiantoro, A. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Desa Sumberrejo Kabupaten Pasuruan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(05), 192–205.
- Rahim, A., Haryadi, W., & Muliawansyah, D. (2024). Analisis faktor rata-rata lama sekolah dan pengangguran terbuka dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 14–25.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Setyanto, W. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Dan Pembangunan Berkelanjutan: Pengalaman Indonesia. *KRITIS*, 34(1), 266–284.
- Siswanto, F. R. (2024). Analisis Dampak Implementasi Sustainable Business Oleh Usaha Mikro Peserta Program Pelatihan

- Dan Pendampingan UMKM 'Transformasi Menuju Bisnis Lestari.' *Seminar Nasional Ilmu Terapan*, 8(1), E23–E23.
- Sukirno, S. (2015). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi 3). *PT Rajagrafindo Persada*.
- Sumarto, S., & Bazzi, S. (2011). *Social Protection in Indonesia: Past Experiences and Lessons for the Future*.
- Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th editi). *Essex Pearson Education Limited*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policyimplementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yin, R. K. 2018). *Case study research and applications: Design and methods*. 6th edn. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications.

